

Policy Note

Tata Kelola dan Rekomendasi Strategis Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Latar Belakang

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), unggulan Presiden RI, bertujuan meningkatkan gizi dan menurunkan *stunting* melalui Badan Gizi Nasional (BGN). Namun, hingga September 2025 tercatat lebih dari 6.452 kasus keracunan di 18 provinsi akibat distribusi terlambat, dapur tidak steril, dan pengolahan pangan yang tidak sesuai SOP. Distribusi SPPG juga masih timpang: wilayah *stunting* tinggi (Papua, NTT, Maluku) justru kekurangan layanan.

Isu Kunci

- Keamanan pangan belum konsisten → dapur tidak steril, *cold chain* terganggu.
- Seleksi mitra SPPG/Yayasan berisiko *moral hazard* (kedekatan politik vs kapasitas).
- Distribusi SPPG tidak berbasis prevalensi *stunting* → *under-coverage* di wilayah prioritas.
- *Monitoring & audit* lemah → risiko *moral hazard* dan *adverse selection* tinggi.

Rekomendasi Kebijakan (Berbasis Regulasi)

1 Audit dan validasi SPPG/yayasan

- Auditor independen tersertifikasi; rotasi tiap 6 bulan; publikasi hasil audit di *dashboard* BGN.
- Pijakan: Permenkes No. 2/2020 tentang Standar *Hygiene* dan Sanitasi; Perpres No. 18/2024 tentang BGN.

2 Standardisasi mitra penyedia pangan

- *e-procurement* transparan, *blacklist* otomatis pelanggar SOP; audit acak oleh BPOM.
- Pijakan: UU No. 18/2012 tentang Pangan; Peraturan BPOM No. 12/2020 tentang Pengawasan Pangan Olahan.
- Sertifikasi halal melalui BPJPH Kemenag (UU No. 33/2014 JPH, PP No. 39/2021).

3 Perencanaan menu & gizi seimbang

- Supervisi menu berbasis standar *Isi Piringku* Kemenkes; substitusi hanya dari daftar resmi setara gizi.
- Pijakan: Permenkes No. 41/2014 Pedoman Gizi Seimbang.

Sumber Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev di presidenri.go.id

4 Pengendalian produksi, distribusi, dan *cold chain*

- *Checklist* digital higienitas dapur; GPS tracking distribusi; sensor suhu real-time.
- Pijakan: Peraturan BPOM No. 13/2019 tentang Pedoman Distribusi Pangan Olahan.

5 Penguatan rantai pasok bahan baku

- Akselerasi kapasitas pelaku usaha penyedia (pertanian dan perikanan) melalui instrumen kebijakan dan dukungan teknis lintas sektor, disertai validasi ketat, *e-procurement* yang transparan, serta pengawasan ketat terhadap SOP dan standar bahan baku.
- Pijakan: RPJMN 2025–2029, PP No. 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional

6 Skala prioritas pareto 20:80

- Rasionalisasi target 32.000 SPPG di akhir tahun 2025, fokus pemenuhan pada ± 100 kabupaten dengan *stunting* tertinggi ($\geq 30\%$) → dampak lebih terukur.
- Pijakan: RPJMN 2025–2029 dan target penurunan *stunting* 14% (Bappenas/Kemenkes).

Catatan Penutup

Keberhasilan MBG ditentukan oleh kepatuhan pada standar keamanan pangan, validasi ketat mitra, serta skala prioritas berbasis risiko gizi. Reformasi tata kelola berbasis regulasi BPOM, BPJPH, dan Kemenkes akan memastikan program berjalan aman, adil, dan efektif dalam percepatan penurunan *stunting*.

Sumber Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev di presidenri.go.id